

IMPLEMENTASI PELAYANAN OMA LANSIA DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DESA PETOK KABUPATEN KEDIRI

Rio Adiwibowo¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: rioadiwibowo@gmail.com

Kata Kunci:

*implementasi kebijakan;
pelayanan publik;
administrasi
kependudukan; akta
kematian; OMA LANSIA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pelayanan OMA LANSIA (Keputusan Kepala Dispendukcapil Nomor AK.01/95/418.23/2023) di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berdasarkan teori Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi), dengan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan jemput bola didukung sosialisasi desa, prosedur yang jelas, dan komitmen aparatur, tetapi dihambat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan petugas dan fasilitas, serta kondisi geografis. Dampak dipahami sebagai persepsi kemudahan layanan.

Keywords:

*policy
implementation; public
service; population
administration; death
certificate; OMA LANSIA*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the OMA LANSIA Service (Head of Civil Registration Office Decree Number AK.01/95/418.23/2023) in Petok Village, Mojo District, Kediri Regency, and its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative approach was used based on Edwards III's theory (communication, resources, disposition, bureaucratic structure), with interview, observation, and documentation data analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that the proactive service is supported by village dissemination, clear procedures, and committed apparatus, but hindered by limited public understanding, limited officers and facilities, and geography. Impact is understood as perceived ease of service.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Melalui sistem administrasi kependudukan yang baik, pemerintah dapat memperoleh data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang penting adalah pencatatan kematian yang dibuktikan dengan penerbitan akta kematian. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mewajibkan setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 hari sejak tanggal kematian.

Akta kematian memiliki fungsi administratif, hukum, dan sosial karena dibutuhkan untuk pengurusan warisan, dana pensiun, asuransi, dan syarat menikah kembali bagi janda atau duda, sedangkan bagi pemerintah dokumen ini diperlukan untuk data statistik (Amalia et al., 2023). Tanpa akta kematian, Dispendukcapil tidak dapat menghapus data penduduk yang telah meninggal dari sistem daftar kependudukan, sehingga data kependudukan menjadi kurang akurat. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen ini masih rendah karena sebagian keluarga menganggap urusan almarhum telah selesai setelah pemakaman (Amalia et al., 2023).

Data empiris menunjukkan bahwa persoalan ini masih nyata di wilayah Kediri. Dispendukcapil Kabupaten Kediri mencatat bahwa pada tahun 2020 diterbitkan 5.857 akta kematian, dan dinas tersebut menyatakan kesadaran masyarakat mengurus dokumen ini menunjukkan peningkatan setelah sosialisasi dilakukan (ANTARA, 2022). Di Kota Kediri, kepemilikan akta kematian secara keseluruhan mencapai sekitar 70 persen pada Agustus 2022, yang menyiratkan masih ada peristiwa kematian yang belum disertai akta, dan dinas setempat menilai masih banyak warga yang belum memahami fungsi dokumen tersebut (ANTARA, 2022). Data khusus mengenai jumlah penduduk, jumlah peristiwa kematian, dan jumlah akta kematian yang terbit di Desa Petok belum tersedia dalam bahan penelitian yang digunakan untuk penyusunan naskah ini. Oleh

karena itu, analisis capaian program pada tingkat desa dibatasi pada temuan kualitatif dan persepsi informan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Dispendukcapil Kabupaten Kediri meluncurkan Program OMA LANSIA (Optimalisasi Peningkatan Kepemilikan Spesial Akta Kematian) berdasarkan Keputusan Kepala DISPENDUKCAPIL Nomor AK.01/95/418.23/2023. Program ini menggunakan pendekatan jemput bola agar keluarga, khususnya keluarga lansia, dapat mengurus akta kematian tanpa harus datang ke kantor dinas. Pendekatan jemput bola juga pernah diterapkan di seluruh desa di Kecamatan Mojo, yang dilaporkan sebagai kecamatan terjauh dari kantor Dispendukcapil di antara kecamatan lain di Kabupaten Kediri (Beritajatim.com, 2020). Desa Petok dipilih sebagai lokasi penelitian karena berada di Kecamatan Mojo dan menjadi konteks pelaksanaan layanan OMA LANSIA. Alasan pemilihan yang lebih spesifik, seperti jumlah penduduk lansia atau angka kematian desa, belum dapat dijelaskan tanpa data resmi tingkat desa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelayanan akta kematian di berbagai daerah. Amalia et al. (2023) meneliti inovasi layanan akta kematian melalui WhatsApp di Kota Mojokerto dengan teori inovasi Rogers dan menemukan bahwa inovasi tersebut menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat, tetapi menyulitkan warga lanjut usia yang kurang menguasai teknologi. Inovasi layanan akta kematian berbasis daring juga dikaji di Kabupaten Sukoharjo oleh Wulandari & Parwiyanto (2021), sedangkan program Gampil di Kota Malang dikaji oleh Jenanu & Nanang (2019). Adapun Surya & Prabawati (2018) menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2016 yang memuat layanan akta kematian dengan teori Edwards III dan menemukan keterbatasan jumlah pegawai serta ruang tunggu sebagai kendala.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada inovasi layanan di tingkat dinas atau kantor pelayanan. Sejauh penelusuran penulis, kajian yang menelaah implementasi layanan jemput bola yang secara khusus menyasar keluarga lansia berdasarkan keputusan kepala dinas pada tingkat desa masih

terbatas, sehingga di sinilah letak kesenjangan penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Program OMA LANSIA di Desa Petok dengan memadukan perspektif aparat desa, petugas Dispendukcapil, dan masyarakat penerima manfaat, yang penting karena keberhasilan jemput bola bergantung pada interaksi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program OMA LANSIA di Desa Petok serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis implementasi Program OMA LANSIA di Desa Petok berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edwards III; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya; dan (3) menelaah persepsi pelaksana dan masyarakat mengenai dampak program terhadap kepemilikan akta kematian. Ketiga tujuan tersebut selaras dengan permasalahan yang diuraikan dan fokus analisis yang dijelaskan pada bagian metode penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi Program OMA LANSIA berdasarkan perspektif pelaksana dan masyarakat sasaran kebijakan (Moleong, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Periode pelaksanaan penelitian tidak tercantum dalam naskah sumber yang tersedia dan perlu ditambahkan berdasarkan catatan lapangan peneliti. Fokus analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang digunakan sebagai kerangka untuk menilai pelaksanaan program (Agustino, 2020).

Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan terlibat langsung atau mengalami pelaksanaan program (Sugiyono,

2022). Kriteria pemilihan informan adalah (a) aparat desa yang terlibat dalam sosialisasi dan koordinasi program, (b) petugas Dispendukcapil Kabupaten Kediri yang melaksanakan layanan jemput bola, dan (c) anggota keluarga penerima manfaat yang telah mengurus akta kematian melalui Program OMA LANSIA. Jumlah dan karakteristik informan disajikan pada Tabel 1, dan identitas informan dalam artikel ini dituliskan dengan kode agar kerahasiaannya terjaga.

Tabel 1. Karakteristik dan kriteria pemilihan informan

Kelompok informan	Karakteristik dan kriteria
Aparat Desa Petok	Terlibat dalam sosialisasi dan koordinasi program; jabatan ditentukan berdasarkan data informan yang sebenarnya
Petugas Dispendukcapil Kabupaten Kediri	Melaksanakan layanan jemput bola OMA LANSIA; bidang/jabatan perlu dicocokkan dengan data informan
Keluarga penerima manfaat	Keluarga yang telah mengurus akta kematian melalui OMA LANSIA; karakteristik rinci tidak dicantumkan

Sumber: Data penelitian, tahun pengumpulan data perlu disesuaikan dengan catatan lapangan peneliti.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan empat variabel Edwards III. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan di lokasi yang disepakati bersama dan direkam setelah memperoleh persetujuan informan. Rincian lokasi, durasi setiap wawancara, serta tanggal dan jumlah kegiatan observasi perlu dilengkapi berdasarkan catatan lapangan peneliti. Observasi dilakukan terhadap konteks sosialisasi dan pelayanan jemput bola. Dokumentasi yang relevan meliputi Keputusan Kepala DISPENDUKCAPIL Nomor AK.01/95/418.23/2023, prosedur operasional standar pelayanan, laporan dan data penerbitan akta kematian, serta foto kegiatan apabila tersedia. Data sekunder lain bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kondensasi, transkrip

wawancara, catatan observasi, dan dokumen dipilah dan dikode berdasarkan empat variabel Edwards III serta faktor pendukung dan penghambat. Data yang telah dikode disajikan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, dan matriks ringkasan per variabel, kemudian ditarik kesimpulan sementara yang diverifikasi berulang selama dan setelah pengumpulan data.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2021). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan aparat desa, petugas Dispendukcapil, dan masyarakat penerima manfaat mengenai hal yang sama, misalnya alur pelayanan dan hambatan yang dihadapi. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan informasi hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen resmi, sedangkan informasi yang tidak konsisten dikonfirmasi ulang kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan tahap penting setelah perumusan kebijakan karena menentukan apakah tujuan kebijakan benar-benar tercapai di lapangan (Rozandi & Digdowiseiso, 2021). Hasil penelitian disajikan berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edwards III, kemudian diikuti faktor pendukung dan penghambat serta persepsi dampak program. Setiap variabel diuraikan melalui temuan lapangan yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dibahas dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian terdahulu. Kutipan wawancara dituliskan dengan kode informan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1, dan ringkasan temuan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Temuan Implementasi Program OMA LANSIA Berdasarkan Variabel Ringkasan Edwards III

Variabel	Temuan Utama	Catatan Kritis
Komunikasi	Sosialisasi melalui pemerintah desa, pertemuan di balai desa, brosur, dan komunikasi informal antarwarga; koordinasi rutin dengan Dispendukcapil.	Bergantung pada saluran informal; tingkat pemahaman warga belum terukur.
Sumber daya	Petugas khusus jemput bola dan aparatur desa; anggaran dari dana operasional Dispendukcapil; jumlah petugas dan fasilitas terbatas.	Pelayanan tidak dapat serentak sehingga memerlukan penjadwalan.
Disposisi	Aparatur berkomitmen, responsif, dan proaktif mendatangi rumah warga lansia.	Komitmen bertumpu pada sikap individu; insentif belum jelas.
Struktur birokrasi	SOP jelas, alur terstruktur, rapat koordinasi, pelaporan rutin, dan pemantauan oleh kepala dinas.	Pemantauan berfokus pada keluaran (jumlah akta), bukan perubahan kepemilikan.

Sumber: Hasil penelitian, diolah penulis

Implementasi Program OMA LANSIA

1. Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program OMA LANSIA disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan perangkat terkait. Informasi mengenai prosedur pelayanan disampaikan melalui pertemuan di balai desa, penyebaran brosur, dan komunikasi informal antarwarga. Pola ini menunjukkan bahwa transmisi informasi program bergantung pada saluran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Temuan mengenai komunikasi menunjukkan bahwa informasi Program OMA LANSIA disampaikan melalui pemerintah desa, pertemuan di balai desa, brosur, dan komunikasi informal antarwarga. Berdasarkan uraian temuan dalam naskah, saluran pemerintah desa membantu mendekatkan informasi kepada keluarga sasaran, sementara komunikasi informal berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman tentang persyaratan. Bukti dokumenter yang dapat digunakan untuk memverifikasi proses sosialisasi meliputi brosur, daftar hadir, notulen, atau foto kegiatan apabila tersedia. Kutipan langsung dan tanggal

wawancara tidak dicantumkan karena transkrip wawancara asli tidak terdapat dalam bahan yang diberikan.

Koordinasi antara Dispendukcapil Kabupaten Kediri dan pemerintah Desa Petok dilakukan secara rutin agar informasi kebijakan tersampaikan secara konsisten kepada aparatur pelaksana di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III (Agustino, 2020) bahwa komunikasi yang efektif dan konsisten merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, ketergantungan pada komunikasi informal antarwarga berisiko menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai persyaratan, sehingga kejelasan informasi perlu dijaga melalui media tertulis yang seragam.

Pola komunikasi tatap muka melalui desa ini relevan dengan sasaran program, yaitu keluarga lansia. Amalia et al. (2023) menemukan bahwa layanan akta kematian berbasis WhatsApp di Kota Mojokerto menyulitkan warga lanjut usia yang kurang menguasai teknologi, sehingga saluran komunikasi langsung melalui perangkat desa dalam penelitian ini lebih sesuai dengan karakter sasaran. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat setelah sosialisasi tidak diukur secara kuantitatif, sehingga anggapan bahwa sosialisasi meningkatkan pemahaman perlu dibaca sebagai persepsi informan dan bukan bukti kausal.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan Program OMA LANSIA didukung oleh aparatur desa dan petugas Dispendukcapil yang ditugaskan khusus untuk layanan jemput bola. Sarana pelayanan yang digunakan dinilai cukup memadai, meskipun jumlah petugas dan fasilitas operasional masih terbatas. Anggaran program bersumber dari dana operasional Dispendukcapil Kabupaten Kediri yang dialokasikan secara proporsional sesuai cakupan wilayah pelayanan.

Uraian temuan menunjukkan bahwa layanan jemput bola melibatkan petugas Dispendukcapil dan aparatur desa, tetapi jumlah petugas, beban kerja, serta rincian sarana dan anggaran belum disertai data terukur dalam naskah sumber. Untuk menjaga ketepatan akademik, jumlah petugas dan besaran

anggaran tidak dinyatakan sebagai angka tanpa dukungan dokumen. Dokumen yang dapat digunakan untuk menguatkan analisis ini meliputi surat tugas, jadwal layanan, serta dokumen anggaran atau laporan kegiatan apabila tersedia.

Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pelayanan tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah desa, sehingga diperlukan penjadwalan yang cermat agar setiap warga terlayani dalam waktu yang wajar (Nugroho, 2021). Kondisi ini selaras dengan temuan Surya & Prabawati (2018) di Kabupaten Sidoarjo yang mencatat keterbatasan jumlah pegawai sebagai kendala implementasi layanan akta kematian. Dalam kerangka Edwards III, sumber daya tidak hanya mencakup jumlah staf, tetapi juga informasi, wewenang, dan fasilitas, sehingga keterbatasan pada salah satunya dapat menurunkan efektivitas dimensi lainnya.

Faktor jarak juga perlu dipertimbangkan dalam menilai kecukupan sumber daya. Kecamatan Mojo dilaporkan sebagai kecamatan terjauh dari kantor Dispendukcapil di Kabupaten Kediri (Beritajatim.com, 2020), sehingga pelayanan jemput bola ke desa-desa di wilayah ini kemungkinan membutuhkan waktu dan biaya operasional yang lebih besar. Oleh karena itu, kecukupan anggaran dan fasilitas operasional layak dievaluasi lebih lanjut, termasuk apakah alokasi yang bersifat proporsional telah mencerminkan beban pelayanan di desa yang jauh.

3. Disposisi

Aparatur pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap responsif dan proaktif menjadi ciri pelayanan jemput bola dalam Program OMA LANSIA. Petugas bersedia mendatangi rumah warga yang membutuhkan layanan, khususnya keluarga lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas.

Uraian temuan dalam naskah menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat merasakan layanan yang lebih mudah karena petugas dapat mendatangi rumah warga, terutama keluarga dengan keterbatasan mobilitas. Sikap responsif dan proaktif tersebut menjadi indikator disposisi positif pelaksana. Namun, kutipan langsung, tanggal wawancara, serta catatan observasi spesifik tidak

tersedia dalam bahan yang diberikan, sehingga bagian ini disajikan sebagai sintesis temuan yang telah dinyatakan dalam naskah, bukan sebagai kutipan verbatim.

Komitmen aparatur tersebut merupakan wujud disposisi positif yang mendukung implementasi kebijakan. Widodo (2021) menjelaskan bahwa disposisi yang baik dari pelaksana kebijakan mendorong efektivitas implementasi, terutama pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun, komitmen yang bertumpu pada sikap individu belum tentu berkelanjutan apabila tidak didukung insentif dan sistem kerja yang jelas, padahal Edwards III (Agustino, 2020) menempatkan insentif sebagai salah satu cara memengaruhi disposisi pelaksana. Naskah sumber belum memuat keterangan terverifikasi mengenai ada atau tidaknya insentif khusus bagi petugas OMA LANSIA, sehingga aspek tersebut perlu diteliti lebih lanjut dan tidak dijadikan kesimpulan empiris.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Program OMA LANSIA telah memiliki prosedur operasional standar yang jelas dan mekanisme koordinasi antara pemerintah desa dengan Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Alur pelayanan yang terstruktur memudahkan masyarakat memahami tahapan pengurusan akta kematian. Alur tersebut juga membantu petugas memberikan pelayanan yang teratur dan akuntabel.

Uraian dalam naskah menyebutkan bahwa pelaksanaan Program OMA LANSIA didukung prosedur operasional standar dan koordinasi antara pemerintah desa dengan Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Untuk memperkuat temuan, SOP perlu diringkas berdasarkan dokumen resminya, sedangkan frekuensi koordinasi perlu dicocokkan dengan notulen, jadwal rapat, atau laporan rutin. Karena dokumen rinci tersebut tidak disertakan dalam bahan yang tersedia, frekuensi rapat dan tahapan administratif spesifik tidak dinyatakan secara pasti dalam artikel ini.

Koordinasi lintas instansi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi dan pelaporan rutin kepada Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Pengawasan

internal dilakukan melalui pemantauan kepala dinas terhadap progres realisasi penerbitan akta kematian di setiap wilayah sasaran (Harsono, 2022). Edwards III (Agustino, 2020) menekankan pentingnya SOP dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi fragmentasi antarpelaksana, dan temuan ini menunjukkan bahwa unsur tersebut telah tersedia di tingkat program. Namun, pemantauan yang berfokus pada progres penerbitan terutama mengukur keluaran, sehingga belum tentu mencerminkan perubahan tingkat kepemilikan akta kematian di tingkat desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor pendukung implementasi Program OMA LANSIA di Desa Petok meliputi komitmen aparatur pelaksana, dukungan pemerintah desa dalam sosialisasi dan koordinasi, koordinasi antara pemerintah desa dan Dispendukcapil, serta pendekatan jemput bola yang memudahkan masyarakat. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan variabel komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kerangka Edwards III. Kutipan langsung informan mengenai faktor pendukung tidak dicantumkan karena transkrip wawancara asli tidak terdapat dalam bahan yang diberikan; uraian ini merangkum temuan yang telah disajikan dalam naskah.

Faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kematian, keterbatasan jumlah petugas di lapangan, keterbatasan fasilitas operasional pelayanan jemput bola, dan kondisi geografis yang membuat sebagian lokasi lebih sulit dijangkau. Rendahnya pemahaman masyarakat sejalan dengan temuan Amalia et al. (2023) bahwa minimnya pemahaman mengenai pentingnya akta kematian dapat berkontribusi pada rendahnya kepemilikan dokumen. Kutipan langsung informan mengenai hambatan tidak dicantumkan karena transkrip wawancara asli tidak terdapat dalam bahan yang diberikan.

Secara kritis, faktor pendukung dan penghambat tersebut saling berkaitan. Keterbatasan petugas dan kondisi geografis meningkatkan beban pelayanan jemput bola, sedangkan rendahnya kesadaran masyarakat menuntut sosialisasi

yang berulang sehingga menambah kebutuhan sumber daya. Dengan demikian, penguatan komunikasi dan penambahan sumber daya perlu dilakukan bersamaan, karena perbaikan pada satu variabel tidak akan optimal bila variabel lain tetap lemah.

Persepsi Dampak Program OMA LANSIA

Menurut informan, Program OMA LANSIA memudahkan keluarga mengurus hak administratif dan hukum yang bergantung pada akta kematian, seperti pengurusan warisan, klaim asuransi, dan pembaruan data keluarga. Kemudahan tersebut terutama dirasakan oleh keluarga lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas karena petugas mendatangi rumah warga. Manfaat ini sejalan dengan fungsi akta kematian sebagaimana dijelaskan oleh (Amalia et al., 2023).

Dampak program dalam penelitian ini ditelaah melalui persepsi informan dan dokumen yang berhasil dihimpun, sehingga temuan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian hubungan sebab-akibat antara program dan peningkatan kepemilikan akta kematian. Berdasarkan uraian temuan dalam naskah, layanan jemput bola dipersepsikan memudahkan keluarga mengurus dokumen yang diperlukan untuk keperluan administratif dan hukum. Kutipan langsung dan tanggal wawancara tidak dicantumkan karena transkrip wawancara asli tidak terdapat dalam bahan yang diberikan. Data jumlah akta kematian yang terbit sebelum dan sesudah program di Desa Petok juga belum tersedia dalam bahan penelitian, sehingga dampak dibatasi pada persepsi kemudahan layanan.

Temuan ini sejalan dengan praktik di Kota Kediri, ketika penyerahan akta kematian langsung ke rumah keluarga disertai edukasi mengenai fungsi akta kematian untuk meningkatkan capaian kepemilikan (ANTARA, 2022). Dalam konteks Desa Petok, kombinasi layanan jemput bola dan edukasi melalui pemerintah desa berpotensi mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Meskipun demikian, kesadaran hukum merupakan perubahan perilaku jangka panjang yang belum dapat disimpulkan dari data

kualitatif ini, sehingga klaim tersebut diposisikan sebagai potensi dan bukan sebagai hasil yang telah terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Program OMA LANSIA di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri berjalan cukup baik berdasarkan empat variabel Edwards III. Pada aspek komunikasi, sosialisasi dilakukan melalui pemerintah desa disertai koordinasi rutin dengan Dispendukcapil. Pada aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, program didukung petugas khusus, prosedur yang jelas, serta komitmen aparatur yang baik, meskipun jumlah petugas dan fasilitas masih terbatas.

Faktor pendukung utama adalah komitmen aparatur, koordinasi antarinstansi, dan dukungan pemerintah desa. Faktor penghambat utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kematian, keterbatasan sumber daya pelayanan, dan kondisi geografis. Kedua kelompok faktor tersebut saling berkaitan, sehingga perbaikan implementasi memerlukan penguatan komunikasi dan sumber daya secara bersamaan.

Dampak program dipahami sebagai persepsi kemudahan layanan dan potensi peningkatan tertib administrasi kependudukan, bukan sebagai bukti kausal peningkatan kepemilikan akta kematian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu desa dengan jumlah informan yang terbatas dan belum menyertakan data kuantitatif sebelum dan sesudah program. Meskipun demikian, temuan ini memberikan gambaran awal mengenai pelaksanaan layanan jemput bola bagi keluarga lansia di tingkat desa.

Saran

Bagi Dispendukcapil Kabupaten Kediri, penambahan jumlah petugas dan fasilitas operasional jemput bola perlu dipertimbangkan, terutama untuk desa yang jauh dari kantor dinas. Penjadwalan kunjungan yang terencana dapat membantu pelayanan menjangkau seluruh warga secara lebih merata. Selain itu,

pemantauan program sebaiknya tidak hanya mengukur jumlah akta yang terbit, tetapi juga perubahan tingkat kepemilikan akta kematian.

Bagi pemerintah Desa Petok, sosialisasi mengenai pentingnya akta kematian perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan informasi yang seragam, misalnya melalui brosur dan pertemuan di balai desa. Perangkat desa juga dapat berperan aktif mencatat dan melaporkan peristiwa kematian agar keluarga tidak melampaui batas waktu pelaporan 30 hari. Dukungan terhadap pelayanan jemput bola perlu dipertahankan agar cakupan kepemilikan akta kematian di seluruh wilayah desa terus meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat melibatkan lebih banyak informan dan lebih dari satu desa agar temuan lebih dapat dibandingkan. Penggunaan data kuantitatif, seperti jumlah akta kematian yang terbit sebelum dan sesudah program, akan memperkuat pembuktian dampak program. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perspektif keluarga yang belum mengurus akta kematian untuk memahami hambatan dari sisi masyarakat.

REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Amalia, A. N., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2023). Inovasi “Pak Mawardi” dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(6), 98–108.
- ANTARA. (2022). Dispendukcapil Kediri “jemput bola” antarkan akta kematian. *ANTARA News Jawa Timur*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/630957/dispdukcapil-kediri-jemput-bola-antarkan-akta-kematian>
- Beritajatim.com. (2020). *Dispendukcapil Kabupaten Kediri mencatat penerbitan 5.857 akta kematian pada 2020*. <https://beritajatim.com/?p=1093841>
- Harsono, H. (2022). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Raja Grafindo Persada.
- Jenanu, K., & Nanang, B. (2019). Program inovasi Gampil (Gesit, Aktif,

- Merakyatnya Dispendukcapil) dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kematian (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 42–47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rozandi, & Digdowiseiso, K. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Deepublish.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surya, R. A., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Paket C layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 6(4).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23180>
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Wulandari, D. T., & Parwiyanto, H. (2021). Inovasi pelayanan akta kematian online melalui aplikasi Adminduk Online Makin Oke (AKOne MAK'e) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 219–233.